

Optimization of Guidance and Supervision of Governance in Garut Region: Challenges and Strategies

Nabiel Waluya Hamzah^{1*}, Maygaza Anhara Putra Brata², Bintang Khoirul Akbar³, Pangeran Dirgantara⁴, Ivan Darmawan⁵

Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Corresponding Author: Nabiel Waluya Hamzah nabiel22003@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

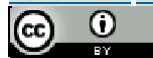
Keywords: Government Development, Government Supervision, Garut

Received : 7 June

Revised : 17 June

Accepted: 20 July

©2024 Hamzah, Brata, Akbar, Dirgantara, Darmawan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Optimizing the development and supervision of governance in the Garut Region is a strategic effort to improve the effectiveness, transparency, and accountability of governance. This study identifies the main challenges faced, namely limited resources, regulatory complexity, and corrupt and nepotistic practices. In facing these challenges, several strategies are implemented, including strengthening human resource capacity through continuous training, utilizing information technology to improve efficiency and transparency, increasing community participation through online feedback and complaint platforms, and closer cooperation with external supervisory institutions. The implementation of these strategies requires careful planning, adequate resource allocation, effective monitoring and evaluation, and strong political commitment and support. Thus, governance in the Garut Region is expected to run more optimally, provide better public services, and improve community welfare

Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Garut: Tantangan dan Strategi

Nabiel Waluya Hamzah^{1*}, Maygaza Anhara Putra Brata², Bintang Khoirul Akbar³, Pangeran Dirgantara⁴, Ivan Darmawan⁵

Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Corresponding Author: Nabiel Waluya Hamzah nabiel22003@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pembinaan Pemerintahan, Pengawasan Pemerintahan, Garut

Received : 7 June

Revised : 17 June

Accepted: 20 July

©2024 Hamzah, Brata, Akbar, Dirgantara, Darmawan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Optimalisasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Garut merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, yaitu keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, serta praktik korupsi dan nepotisme. Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa strategi diterapkan, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat melalui platform feedback dan pengaduan online, serta kerjasama yang lebih erat dengan lembaga pengawasan eksternal. Implementasi strategi-strategi ini memerlukan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang memadai, monitoring dan evaluasi yang efektif, serta komitmen dan dukungan politik yang kuat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Garut diharapkan dapat berjalan lebih optimal, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yanuarsari, 2021). Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi dan potensi daerah masing-masing (Basniwati, 2021). Daerah Garut, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kabupaten Garut memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan berbagai dinamika politik dan sosial. Terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, Garut dikenal dengan kekayaan alamnya yang meliputi pegunungan, lembah, dan danau. Wilayahnya yang luas dengan topografi yang bervariasi menjadikan Garut sebagai daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sejarah Garut tidak bisa dilepaskan dari peran pentingnya sebagai pusat perdagangan dan pertanian sejak masa kolonial Belanda. Peninggalan sejarah ini masih bisa dilihat dalam berbagai bangunan tua dan struktur sosial yang ada di daerah ini. Namun, perkembangan zaman dan perubahan ekonomi global menuntut Garut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas pemerintahannya dalam menghadapi tantangan modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Garut adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur. Keterbatasan ini sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang ada sering kali belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menghadapi kompleksitas tugas pemerintahan modern. Di sisi lain, anggaran yang terbatas juga membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Selain keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Berbagai peraturan perundang-undangan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah sering kali menimbulkan kebingungan dan interpretasi yang berbeda-beda (Kushadianto, 2024). Hal ini tidak jarang menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan program yang pada akhirnya menghambat efektivitas pelaksanaan pemerintahan. Kebutuhan akan harmonisasi dan simplifikasi regulasi menjadi sangat mendesak untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Praktik-praktik korupsi dan nepotisme masih menjadi masalah yang cukup serius di banyak daerah, termasuk di Garut. Korupsi merusak integritas dan

akuntabilitas pemerintahan, serta menghambat upaya-upaya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nepotisme, di sisi lain, mengganggu proses rekrutmen dan promosi pegawai pemerintah, sehingga sering kali menghalangi individu-individu yang kompeten untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan yang optimal. Pembinaan dalam konteks ini mencakup berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan, serta penyusunan kebijakan yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan, baik internal maupun eksternal, diperlukan untuk memastikan bahwa semua proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Salah satu langkah penting dalam pembinaan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan merupakan kunci untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan. Program pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, aparatur pemerintahan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam upaya optimalisasi pembinaan dan pengawasan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam berbagai proses pemerintahan (Mukhsin, 2020). Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat membantu dalam monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan, serta memudahkan akses publik terhadap informasi yang relevan. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, misalnya melalui platform *feedback* dan pengaduan online.

METODOLOGI

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan juga perlu ditingkatkan. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka (Rahmatullisa, 2024). Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuka saluran komunikasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan *feedback* dan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai forum dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kerjasama antar lembaga juga merupakan strategi yang penting dalam upaya optimalisasi pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu membangun kerjasama yang lebih erat dengan lembaga pengawasan eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK). Kerjasama ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran informasi, koordinasi dalam pelaksanaan audit, hingga pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas pengawasan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan eksternal, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan independen.

Optimalisasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Garut membutuhkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar lembaga merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Garut dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Upaya pembinaan dan pengawasan yang optimal tidak hanya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga akan membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Garut. Oleh karena itu, komitmen dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga pengawasan eksternal, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Pembinaan dan Pengawasan

Optimalisasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah Garut menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang harus dihadapi:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Pemerintah Daerah Garut sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Keterbatasan ini dapat menghambat berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Aparatur pemerintah daerah mungkin belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif. Hal ini mencakup kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Selain itu, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian mereka juga dapat mengurangi efektivitas pemerintahan.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Garut. Anggaran yang terbatas berarti bahwa banyak program dan proyek yang tidak dapat dilaksanakan atau harus dikurangi cakupannya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran yang tidak tepat atau tidak efisien juga dapat menghambat upaya pembangunan daerah.

Infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat aksesibilitas dan mobilitas, serta mengurangi efisiensi operasional

pemerintah daerah. Misalnya, jalan yang rusak atau kurangnya fasilitas komunikasi dapat memperlambat pelaksanaan program dan pelayanan publik (Wirawan, 2020).

2. Kompleksitas Regulasi

Regulasi yang kompleks dan sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Banyaknya regulasi yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah sering kali menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan program.

Penerapan regulasi yang tidak konsisten dan sering kali berubah dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di tingkat pelaksana. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, regulasi yang terlalu ketat atau birokratis juga dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.

Kebutuhan akan harmonisasi regulasi menjadi sangat mendesak. Regulasi yang tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain dapat menghambat efektivitas pelaksanaan pemerintahan (Busroh, 2024). Diperlukan upaya untuk menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh aparatur pemerintah daerah.

3. Korupsi dan Nepotisme

Korupsi dan nepotisme masih menjadi masalah serius di banyak daerah, termasuk di Garut. Praktik-praktik ini merusak integritas dan akuntabilitas pemerintahan, serta menghambat upaya-upaya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi mengurangi efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan dan mencakup berbagai bentuk, seperti suap, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan anggaran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang tegas dan sistematis, termasuk penegakan hukum yang ketat dan penguatan sistem pengawasan internal.

Nepotisme dalam rekrutmen dan promosi pegawai pemerintah dapat mengurangi kualitas aparatur pemerintahan. Penempatan pegawai berdasarkan hubungan pribadi atau kekeluargaan, bukannya berdasarkan kompetensi dan kinerja, dapat menghambat upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan sistem rekrutmen dan promosi yang transparan dan akuntabel.

Strategi Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi-strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Garut:

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah penting dalam upaya optimalisasi pembinaan dan pengawasan (Astuti, 2023). Hal ini mencakup berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional bagi aparatur pemerintahan.

Pelatihan yang berkelanjutan dan terarah dapat membantu meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur pemerintahan. Program pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pelatihan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Garut.

Penempatan pegawai yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi mereka dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan. Sistem rekrutmen dan promosi yang transparan dan akuntabel dapat membantu memastikan bahwa pegawai yang menduduki posisi strategis memiliki kualifikasi yang sesuai. Selain itu, evaluasi kinerja yang objektif dan berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai yang berkinerja baik mendapatkan penghargaan yang layak.

2. Penerapan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam berbagai proses pemerintahan (Utami, 2023). Teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung berbagai aspek pengawasan dan pembinaan.

Pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat membantu dalam monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan. Sistem ini dapat menyediakan data dan informasi yang akurat dan real-time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antar berbagai unit dan lembaga pemerintahan.

Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Platform feedback dan pengaduan online dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, platform ini juga dapat digunakan untuk memantau tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan, sehingga memastikan bahwa setiap keluhan atau saran mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan.

Pemerintah daerah perlu membuka saluran komunikasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat mencakup berbagai media, seperti website, media sosial, dan aplikasi mobile, yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan feedback dan pengaduan dengan mudah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyelenggarakan forum-forum konsultasi publik secara reguler, di mana masyarakat dapat berdiskusi dan memberikan masukan terkait berbagai isu dan kebijakan pemerintahan.

Peningkatan partisipasi masyarakat juga memerlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terkait pentingnya pengawasan pemerintahan. Program pendidikan dan kampanye publik dapat

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemerintahan. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melakukan pengawasan yang efektif, misalnya melalui pelatihan mengenai teknik-teknik pengawasan dan analisis kebijakan.

4. Kerjasama Antar Lembaga

Kerjasama antar lembaga merupakan strategi penting dalam upaya optimalisasi pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu membangun kerjasama yang lebih erat dengan lembaga pengawasan eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Hira, 2022).

Kerjasama yang efektif memerlukan pertukaran informasi dan koordinasi yang baik antar berbagai lembaga. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang akurat dan tepat waktu antara berbagai unit dan lembaga pemerintahan. Selain itu, koordinasi yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengawasan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan proses pengawasan.

Pelatihan bersama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan eksternal dapat membantu meningkatkan kapasitas pengawasan. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, seperti teknik audit, analisis kebijakan, dan penegakan hukum. Selain itu, pelatihan bersama juga dapat membantu membangun hubungan yang lebih erat dan saling percaya antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan eksternal.

Penegakan hukum yang ketat dan tidak diskriminatif merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah korupsi dan nepotisme. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan tindakan yang tegas dan adil. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah praktik-praktik korupsi dan nepotisme.

Implementasi Strategi dan Evaluasi

Implementasi strategi-strategi yang telah disebutkan di atas memerlukan perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan implementasi yang efektif:

1. Perencanaan yang Matang

Setiap strategi perlu dirumuskan dalam bentuk rencana aksi yang jelas dan terukur. Rencana aksi ini harus mencakup tujuan, target, indikator kinerja, dan timeline yang spesifik. Rencana aksi juga perlu disusun secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawasan eksternal.

2. Pengalokasian Sumber Daya

Implementasi strategi memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran yang cukup

dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa sumber daya manusia yang diperlukan tersedia dan memiliki kapasitas yang memadai.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari proses implementasi. Pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, serta mengukur hasil dan dampaknya. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi juga perlu digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap rencana aksi yang telah disusun.

4. Komitmen dan Dukungan Politik

Implementasi strategi memerlukan komitmen dan dukungan politik yang kuat dari pimpinan daerah. Pimpinan daerah perlu memberikan arahan yang jelas dan konsisten, serta memastikan bahwa semua unit dan lembaga pemerintahan mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, pimpinan daerah juga perlu membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawasan eksternal.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta bahwa hasil-hasil dari berbagai program dan kegiatan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa semua aparatur pemerintahan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Optimalisasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Garut memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Tantangan-tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, serta masalah korupsi dan nepotisme harus dihadapi dengan berbagai upaya yang melibatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kerjasama antar lembaga. Implementasi strategi-strategi ini memerlukan perencanaan yang matang, pengalokasian sumber daya yang memadai, monitoring dan evaluasi yang efektif, komitmen dan dukungan politik yang kuat, serta penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Garut dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. G. A. U., & Asnianti, A. (2023). Optimalisasi Tata Kelola Kearsipan Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. *PUSAKA*, 11(1), 29-42.
- Basniwati, A., Khair, A., Kafrawi, K., & Saleh, M. (2021). Kajian Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7(2), 123-131.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699-711.
- Hira, R. H., Savvira, Y., & Tresia, Y. (2022). Pemberantasan Tindak Pidana Suap di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(2), 01-20.
- Kushadianto, M. M. B., & Putra, M. D. (2024). Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum. *Syntax Idea*, 6(3), 1476-1484.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7-15.
- Rahmatullisa, S., Astuti, M., & Hidayat, H. (2024). Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 935-945.
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 1-9.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1-16.
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6307-6317.